

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan di Kabupaten Bekasi masih menjadi persoalan prioritas. Hal tersebut berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2020 dibandingkan dengan daerah lain kemiskinan Kabupaten Bekasi menduduki urutan ke-6 (Badan Pusat Statistik, 2020). Dari data tersebut faktor datang dari individu, kurangnya lapangan pekerjaan, banyaknya pengangguran dan kurangnya evaluasi penanggulangan kemiskinan (Silitonga, 2017). Kemiskinan merupakan keterbatasan individu dalam memenuhi dan meningkatkan kebutuhan hidupnya. Kemiskinan meliputi kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut ialah keterbatasan masyarakat melebihi batas kesulitan yang ditetapkan, sedangkan kemiskinan relatif adanya ketidaksamaan upah ataupun penghasilan pada masing-masing individu (Harlik, dkk, 2013). Menurut Bank Dunia, salah satu faktor kemiskinan terbatasnya lapangan pekerjaan, meningkatnya pengangguran, serta kurangnya tempat untuk tingkat pendidikan dan kesehatan mereka (World Bank, 2020).

Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik Pemerintah Kabupaten Bekasi pada Agustus 2018, diperoleh sekitar 413.889 orang yang bekerja pada sektor informal di Kabupaten Bekasi. Pada data tersebut banyaknya pekerja sektor informal dibandingkan sektor formal juga menjadi faktor kemiskinan. Pekerja informal di Kabupaten Bekasi hanya menggunakan teknologi sederhana dikarenakan kurangnya keahlian. Hal tersebut berpengaruh dengan rendahnya tingkat produktifitas individu dan pendapatannya. Salah satu solusi hal tersebut untuk memperluas keproduktifan individu yaitu peningkatan pendidikan dan keterampilan yang berpengaruh pada kualitas kehidupan sehingga menambah kesejahteraan dan kemandirian hidup individu. Berdasarkan data Dinas Sosial Kabupaten Bekasi tahun 2020 terdapat 22.5972 jiwa masyarakat miskin di Kabupaten Bekasi. Dari data tersebut terdapat kelompok disabilitas sebanyak 4.763 jiwa terdiri dari 1.333 jiwa tuna daksa, 778

jiwa tuna netra, 577 jiwa tuna rungu wicara, 343 jiwa tuna grahita, 1.734 disabilitas lainnya. Dari data ini sebanyak 3.080 jiwa penyandang disabilitas tidak bisa bekerja, 538 jiwa penyandang disabilitas bekerja, 1.146 jiwa penyandang disabilitas tidak bekerja dan tidak memiliki keterampilan. Dari data tersebut juga menjelaskan bahwa mayoritas penyandang disabilitas memiliki keterbatasan lapangan pekerjaan khusus yang seharusnya bisa disesuaikan dengan keadaan fisik individu penyandang disabilitas. Salah satu upaya untuk mengurangi angka kemiskinan penyandang disabilitas di Kabupaten Bekasi yaitu melalui tahap pemberdayaan untuk meningkatkan kapasitas yang dimiliki penyandang disabilitas melalui pelatihan keterampilan dan mengembangkan potensi penyandang disabilitas, sehingga akan terwujudnya kesejahteraan dan kemandirian penyandang disabilitas (Hayati & Surya, 2018). Pemberdayaan tersebut untuk mendorong serta meningkatkan kualitas dan nilai penyandang disabilitas. Keterbatasan tidak menjadi halangan untuk mengembangkan dan menggali potensi sehingga bangkit dari kemiskinan dan keterbelakangan agar terwujudnya kemandirian penyandang disabilitas (Anwar, 2007).

Berdasarkan Undang-undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat Pasal 1 dan 5 bahwa setiap warga negara berdaulat menerima lindungan tanpa dibedakan, warga negara sama rata dalam mempunyai hak dan kesempatan pada seluruh aspek berwarganegara. Pada Pasal 4 tersebut juga menjelaskan bahwa segala usaha peningkatan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan undang-undang tersebut dapat disimpulkan bahwa penyandang disabilitas termasuk warga negara yang sama memegang hak, peran dan kewajiban dengan individu lainnya, dan mereka juga memerlukan pembinaan dalam pemberdayaan yang bertujuan terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan.

Pemberdayaan menggambarkan upaya mengembangkan potensi diri menggunakan cara memotivasi dan membangkitkan kesadaran pada keterampilan yang terdapat pada penyandang disabilitas (Sugandi, 2011: 182). Pemberdayaan tersebut juga sangat penting demi pemenuhan hak dan pemberian kapasitas pada aspek kehidupan agar potensi dan kemampuannya terwujud sepenuhnya (Hasan, 2018). Pemberdayaan tersebut sudah menjadi bagian khusus dan tanggung jawab

pemerintahan di Kabupaten Bekasi yaitu pada Dinas Sosial Kabupaten Bekasi sebagai instansi yang bertanggungjawab dengan permasalahan penyandang disabilitas (Baturangka, dkk, 2019). Berperan sebagai instansi yang memiliki kewenangan dalam pemberdayaan penyandang disabilitas, Dinas Sosial Kabupaten Bekasi secara maksimal melakukan pemberdayaan bagi para penyandang disabilitas melalui pelatihan program kewirausahaan untuk meningkatkan potensi dan keterampilan sehingga mampu mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Bekasi (Baturangka, dkk, 2019).

Kepala Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kabupaten Bekasi, Ali Imron menjelaskan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan program tersebut dilaksanakan sejak tahun 2018 hingga tahun 2021. Program ini untuk mendorong potensi penyandang disabilitas yang mampu dikembangkan dan mewujudkan kemandirian dalam kehidupan masyarakat. Pemberdayaan juga sebagai bentuk kesadaran kemampuan fisik, mental dan sosialnya yang memungkinkan penyandang disabilitas bekerja sesuai dengan kemampuannya serta sesuai dengan jenis disabilitasnya, dan mereka menjadi mandiri dalam kehidupan bermasyarakat. Proses pelaksanaan pemberdayaan tersebut merupakan suatu proses komunikasi yang sangat penting dalam mengimplementasikan sebuah program pemerintahan atau pembangunan (Rinawati, 2006). Proses komunikasi ini merupakan suatu proses komunikasi partisipatif yang diharapkan membantu permasalahan penyandang disabilitas di Kabupaten Bekasi dalam meningkatkan keterampilan, kesejahteraan, dan kemandirian. Komunikasi tersebut juga dipandang sebagai sarana ampuh yang dapat memfasilitasi keterlibatan proses partisipatif penyandang disabilitas pada pelatihan keterampilan program kewirausahaan.

Kegiatan pemberdayaan penyandang disabilitas yang dilaksanakan yaitu pelatihan keterampilan disabilitas tuna daksa, tuna netra, dan tuna rungu-wicara. Dari program Dinas Sosial Kabupaten Bekasi pada pemberdayaan tersebut banyak pihak-pihak yang terlibat seperti yayasan penyandang disabilitas dan komunitas penyandang disabilitas sehingga informasi mengenai pemberdayaan sampai kepada penyandang disabilitas. Pada pelatihan keterampilan ini Dinas Sosial Kabupaten Bekasi bertujuan melibatkan penyandang disabilitas secara aktif untuk

berpartisipasi dan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang nantinya bisa bermanfaat bagi penyandang disabilitas untuk lebih mandiri sehingga bisa membantu dalam aspek perekonomiannya dan meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian penyandang disabilitas. Maka penelitian dilakukan lebih lanjut mengenai **“Komunikasi Partisipatif dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Pada Program Kewirausahaan di Kabupaten Bekasi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan, rumusan masalah ialah bagaimana Komunikasi Partisipatif dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Pada Program Kewirausahaan di Kabupaten Bekasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut yang sudah diuraikan, tujuan penelitian ini untuk mengetahui Komunikasi Partisipatif dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Pada Program Kewirausahaan di Kabupaten Bekasi.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian diharapkan menjadi referensi pada kajian komunikasi partisipatif khususnya pada kegiatan pemberdayaan masyarakat pada program kewirausahaan tersebut.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Dinas Sosial

- 1) Sebagai bentuk evaluasi dari kegiatan penyandang disabilitas Dinas Sosial Kabupaten Bekasi dalam pemberdayaan program kewirausahaan.
- 2) Sebagai pertimbangan bagi Dinas Sosial Kabupaten Bekasi untuk perbaikan dan penyempurnaan program kewirausahaan yang telah dilaksanakan dalam pemberdayaan penyandang disabilitas.

b. Bagi Penyandang Disabilitas

Penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada penyandang disabilitas mengenai pemberdayaan penyandang disabilitas

dalam pelatihan keterampilan program kewirausahaan, untuk memajukan, meningkatkan kreativitas dan keterampilan sehingga mereka dapat menumbuhkembangkan dan optimalisasi kreativitas dan kemandirian dalam kehidupannya secara layak.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian diharapkan dapat menyampaikan informasi serta pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat bahwasannya di Kabupaten Bekasi melalui instansi Dinas Sosial Kabupaten Bekasi telah melakukan kegiatan pemberdayaan penyandang disabilitas melalui program kewirausahaan.

